



ANALISIS KETIDAKEFEKTIFAN DEKLARASI PANMUNJOM SEBAGAI UPAYA REUNIFIKASI SEMENANJUNG KOREA

Nabila Lam'anah, Muhammad Faizal Alfian

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

North and South Korea have made various peace efforts to overcome the issue of denuclearization of the Korean Peninsula. However, so far the peace efforts that have been made by the two Koreas have not been successful. This is caused by the relations between the two countries which are still marked by mutual distrust, lack of cooperation, hatred, and ideological conflict. Then, the two Koreas made peace efforts again called the Panmunjom Declaration in 2018. The main points of this declaration are a commitment to end the confrontation of the legacy of war that has been going on for a long time, to increase cooperative relations between the Koreas, and denuclearize the Korean Peninsula region. At first, the Panmunjom Declaration became a new achievement in the peace of the Korean Peninsula. Over time, the Panmunjom Declaration became ineffective in carrying out its role as a medium for creating peace and denuclearizing the region. This research will answer the question "Why is the Panmunjom Declaration ineffective in improving relations between North Korea and South Korea?". This study aims to analyze the perceptions and misperceptions that occur between the two countries using the theory of perceptions and misperceptions by Robert Jervis. This study used a qualitative research method which explained that what caused the Panmunjom Declaration to be ineffective was due to misperceptions between North Korea and South Korea.

Keywords: *Panmunjom Declaration, International Agreement Failure, Misperceptipn, North Korea, South Korea.*

PENDAHULUAN

Setelah perang Korea pada tahun 1950 terjadi, berbagai upaya untuk perdamaian Semenanjung Korea yang terpecah sudah dilakukan namun terus dijumpai kegagalan. Hingga akhirnya kedua pimpinan sepakat untuk melaksanakan pertemuan kembali yang jatuh pada tanggal 27 April 2018. Pertemuan ini kemudian dinamakan "Deklarasi Panmunjom" yang membawa harapan baru atas isu perdamaian yang selama ini terjadi diantara kedua Korea. Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah dikarenakan adanya perbedaan ideologi, permasalahan keamanan, dan isu nuklir korea utara yang hingga saat ini menjadi kekhawatiran internasional.

Pada dasarnya Deklarasi Panmunjom berisikan mengenai komitmen dari kedua Korea untuk mengakhiri peninggalan perang dingin. Seperti perpecahan yang sudah lama terjadi serta memajukan perdamaian dan kemakmuran demi mengembangkan hubungan kedua Korea. Secara garis besar, deklarasi ini berisikan beberapa janji serta komitmen yang dibangun oleh kedua Korea untuk mengakhiri perpecahan yaitu dengan perdamaian yang bersifat permanen, berjanji untuk kembali melakukan kerjasama dan upaya kedua Korea untuk mewujudkan denuklirisasi di kawasan Semenanjung Jihua. Sebagai upaya

perdamaian, Deklarasi Panmunjom terus diimplementasikan sesuai dengan isi-isi yang tertuang didalamnya. Bahkan kedua Korea kerap mengadakan acara resmi dalam rangka memperingati hari jadi Deklarasi Panmunjom yaitu setiap tanggal 27 April. Namun, pada tahun 2021 kedua Korea tidak memperingati hari jadi tersebut. Mulai dari kejadian ini, Deklarasi Panmunjom dapat dikatakan tidak efektif dengan dukungan dari beberapa sebab lainnya. Deklarasi Panmunjom yang sudah berjalan selama 3 tahun nyatanya tidak dapat mencapai perdamaian yang diinginkan. Bahkan, deklarasi ini tenggelam seperti tidak terlihat lagi. deklarasi ini tenggelam seperti tidak terlihat lagi. Jika ditelusuri lebih lanjut rupanya Deklarasi Panmunjom mengalami kebuntuan dalam diplomasi nuklir yang ada dan eskalasi ketegangan Pyongyang yang baru-baru ini terjadi (Sung-mi, 2021). Deklarasi ini dapat dikatakan sama saja dengan deklarasi dan upaya-upaya yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh kedua Korea. Setelah Deklarasi Panmunjom di sepakati, Korea Utara dan Korea Selatan masih saja mengalami konflik.

Perpecahan diantara kedua Korea tentunya berpengaruh terhadap isu domestic, ekonomi, militer hingga diplomatik masing-masing negara. Dahulu, hubungan kedua Korea sempat membaik dibawah kebijakan *Sunshine Policy* Korea Selatan yang bertujuan untuk melunakan sikap Korea Utara melalui interaksi yang dilakukan seperti bantuan ekonomi. Namun, hubungan Korea Utara dan korea Selatan yang telah membaik sementara selalu berakhir dengan kebuntuan serta kegagalan dana upaya perdamaianya. Kedua Korea telah melakukan berbagi upaya raunifikasi seperti Pernyataan Bersama 4 Juli 1972, Pertemuan Tingkat Tinggi Korea Pertama dan Pertemuan Tingkat Tinggi Korea Kedua yang masing-masing sempat memperbaiki hubungan kedua Korea namun menjumpai kegagalan. Bahkan, dalam hal ini negara lainnya juga turut berkontribusi untuk mengupayakan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan serta penyelesaian isu nuklir Korea Utara dengan menyepakati *Non-proliferation Treaty* pada tahun 1968 dan forum *Six Party Talks* pada tahun 2003. Yang mana semua upaya yang telah dilakukan ini tidak mencapai hasil yang diinginkan karena salah kedua ihak masih menaruh rasa saling tidak percaya.

Penelitian mengenai ketidakefektifan Deklarasi Panmunjom antara Korea Utara dan Korea Selatan belum banyak dilakukan. Penelitian Kartini (2018) menyimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi antar korea pada tahun 2000 dan 2007, serta adanya pernyataan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan memiliki keinginan untuk terus menciptakan rezim sebagai upaya perdamaian. Sementara Liviamanda, Eby Hara, dan Indriastuti (2012) meneliti mengenai analisis keputusan Korea Utara dalam hal pembatalan upaya reunifikasi Korea yan disepakati pada tahun 2000 berdasarkan faktor internal dan eksternal yang ada. Kekawatiran tersebut adalah berubahnya sistem komunisme ke kapitalisme dan juga karena adanya syarat yang diberikan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara berupa bantuan ekonomi yang dapat kembali normal jika Korea Utara patuh dan bersedia melaksanakan denuklirisasi kekuatan militernya.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai Deklarasi Panmunjom, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai faktor penyebab ketidakefektifan Deklarasi Panmunjom. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang menyebabkan Deklarasi Panmunjom tidak efektif dalam upayanya untuk perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan dengan menggunakan teori mispersepsi. Dalam tulisan ini penulis beragumen bahwa ketidakefetifan dalam upaya perdamaian semenajung korea melalui Deklarasi Panmunjom disebabkan oleh adanya persepsi buruh dari Korea Utara terhadap Korea

Selatan. Dimana Korea Utara beranggapan bahwa pihak berwenang Korea Selatan tidak melakukan tindakan apapun terkait serangan dari pembelot anti korea yang bermunculan. Namun, pada kenyataannya korea selatan telah melakukan upayanya untuk mencegah tindakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dimana penelitian ini dalam penjelasannya akan bersifat lebih mendalam sehingga akan memaksa peneliti untuk menggali secara lebih dalam informasi untuk memperoleh gambaran utuh mengenai suatu fenomena yang dikaji (Rosyidin, 2019). Dengan metode kualitatif, penulis akan berusaha untuk menjelaskan secara menyeluruh faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Deklarasi Panmunjom sebagai upaya perdamaian Semenanjung Korea tidak efektif. Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif yang mana tipe ini akan berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena bukan hanya luarnya namun sampai ke akar-akarnya. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha untuk mencari kecocokan antara kerangka teori dalam penelitian dan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi Pustaka dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini akan menggunakan teori Mispersepsi. Melalui pendekatan kognitifisme atau psikologi politik yang merupakan suatu pendekatan yang berfokus kepada bagaimana setiap individu maupun kelompok kecil yang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pendekatan kognitif dikenal dalam wilayah psikologis seseorang yang memiliki hubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengelolaan informasi hingga keyakinan seseorang. Kognitifisme biasanya dikaitkan dengan bagaimana seseorang memproses, memperhatikan, menyimpan serta mengingat suatu informasi (Simmons et al., 2011). Setiap individu akan berusaha untuk menjaga konsistensi serta menghindari disonansi yang muncul saat ada keyakinan yang bertentangan satu dengan yang lainnya (Festinger, 1968).

Persepsi adalah cara pandang melalui pemahaman (*beliefs*) atas aktor-aktor lainnya (*images*), serta apa yang nantinya akan dilakukan oleh aktor tersebut terhadap situasi yang terjadi (*intentions*) yang nantinya akan menentukan tindakan suatu negara (Jervis, 2017). *Belief* merupakan kepercayaan suatu negara dalam mengambil tindakan, *Image* merupakan hal yang menggambarkan perilaku suatu negara dan *intentions* merupakan prediksi dari apa yang akan dilakukan oleh suatu negara (Jervis, 2017). Melalui ketiga elemen yang dijelaskan oleh Jervis ini cenderung bias, dan dapat menyebabkan terjadinya mispersepsi. Sebab kemunculan mispersepsi sendiri dibagi menjadi dua faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah adanya konsistensi kognitif yaitu keadaan dimana individu cenderung meyakini apa yang sudah diyakini sejak lama yang dinamakan dengan *pre-existing beliefs* dan akan mempertahankan hal tersebut. Seseorang cenderung merawat persepsi yang sudah ditanamkan sejak dahulu, walaupun kenyataan yang ada bertentangan dengan kepercayaannya dan akan tetap berpegang pada keyakinannya sendiri (Jervis, 2017). Konsistensi kognitif merupakan kecenderungan seseorang yang terlalu mempercayai keyakinannya sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan keyakinan tersebut sudah lama mengakar di dalam dirinya, sehingga keyakinan ini sulit untuk diubah. Dengan kondisi tersebut maka perilaku seseorang ini akan cenderung konsisten dengan keyakinannya. Kondisi ini juga bisa saja terjadi ketika seseorang sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah ada sehingga tidak mau menerima perbedaan pada kenyataan yang ada.

PEMBAHASAN

Upaya-upaya Reunifikasi Semenanjung Korea

Perbedaan ideologi merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi hubungan kedua Korea. Hal ini diperparah oleh isu kedaulatan dan permasalahan keamanan yang diakibatkan oleh pengembangan uji nuklir Korea Utara. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tensi politik internasional dan sudah terjadi sejak lama dan juga keamanan kawasan Korea Selatan mengingat jarak kedua negara ini secara geografis berdekatan. Untuk meredakan permusuhan yang terjadi, kedua Korea kerap bersama-sama berupaya untuk menciptakan perdamaian dan denuklirisasi. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Bersama 4 Juli 1972

Pernyataan Bersama 4 Juli 1972 ini memiliki peranan penting bagi perkembangan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Pernyataan ini menjadi langkah awal kedua Korea menuju perdamaian. Pertemuan ini diadakan di Panmunjom dan menyepakati beberapa hal terkait perdamaian serta solidaritas yang ada diantara kedua Korea. Dimana kedua Korea Sepakat untuk bersama-sama menahan diri agar tidak saling menfitnah dan juga larangan mengenai penggunaan kekuatan militer. Namun, seiring berjalannya waktu pernyataan ini tidak menghasilkan kemajuan. Pembahasan serta segala kesepakatan yang terkandung didalamnya malah berubah menjadi suatu perdebatan yang diperdebatkan oleh kedua Korea.

2. Pertemuan Tingkat Tinggi Korea Pertama

Berdasarkan keadaan Korea Utara yang memprihatinkan, Kim Dae-jung kemudian berupaya menegosiasi Kim Jong-il untuk menerima kebijakan reunifikasi. Pada tahun 2000, berbuah hasil pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea pada 13-15 Juli di Pyongyang, Korea Utara. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi perjanjian yang menjadi kerangka kerja institusionalis bagi kedua negara untuk hidup berdampingan secara damai. Secara sepsifik, kedua Korea sepakat untuk menegakan serta menuntaskan isu penyatuan secara nasional, menuju penyatuan secara nasional yang berlandaskan sistem konfederasi (Korea Selatan) dan federasi (Korea Utara), menuntaskan masalah kemanusiaan, mengaktifkan pertukaran ekonomi dan peningkatan rasa saling percaya, serta melakukan dialog instansi untuk melaksanakan kesepakatan (KBS, 2000). Pertemuan ini menghasilkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan meningkatkan angka pertukaran masyarakat (Jung, 2012). Kesepakatan ini kemudian juga tidak berlangsung sebagai mana mestinya dan menemukan hambatan.

3. Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Korea Kedua

Dalam perjanjian ini kedua Korea menyepakati upaya aktif dalam mewujudkan Deklarasi Bersama 15 Juli 2000. Selain itu, deklarasi ini juga menciptakan hubungan antar Korea yang saling menghormati dan percaya satu sama lain. Deklarasi Bersama 15 Juli 2000 ini berisikan mengenai komitmen kedua negara untuk menyudahi permusuhan yang berbau militer, meminimalisir ketegangan, serta mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Selama berlangsungnya deklarasi ini hubungan yang harmonis mulai tercipta diantara Korea Utara dan Korea Selatan. Sangat disayangkan keharmonisan antara kedua Korea tidak berlangsung lama dan harus berakhir pada akhir tahun 2007. Kegagalan dari pertemuan ini dikarenakan adanya pergantian presiden yang kebijakannya berbeda.

4. Nuclear Non-proliferation Treaty

Nuclear Non-Proliferation Treaty adalah perjanjian yang bertujuan untuk pelucutan senjata nuklir secara umum menyeluruh, penggunaan nuklir dengan tujuan secara damai, dan mencegah adanya persebaran senjata nuklir. Pada dasarnya perjanjian ini mempunyai tiga pilar utama yaitu *non-proliferation*, *peaceful uses*, dan *disarmament* (UNODA, n.d.). Kemunculan dari perjanjian ini dikarenakan sebagai sebuah bentuk usaha untuk mencegah penyebaran senjata nuklir yang sudah berlangsung sejak awal era nuklir dan perjanjian ini berada dibawah tanggung jawab *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Akhirnya, pada tanggal 1 Juli 1968, *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) berhasil ditandatangani dan dianggap secara aktif setelah diratifikasi oleh Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet serta 40 negara lainnya yang tergabung. Korea Utara resmi bergabung dengan menandatangani NPT dan menyetujui segala program yang ada di dalam perjanjian tersebut pada tanggal 12 Desember tahun 1985. Bergabungnya Korea Utara dikarenakan adanya desakan dunia Internasional dan meningkatnya laporan dari intelejen Amerika Serikat terkait pembangunan reaktor nuklir di Korea Utara.

5. Six-Party Talks

Six Party Talks berdiri sebagai sebuah rezim internasional yang diharapkan untuk mengatur segala norma, aturan dan perilaku aktor-aktor internasional yang terlibat dengan krisis nuklir di Semenanjung Korea. Salah satu alasan terbentuknya *Six Party Talks* adalah dikarenakan pengunduran diri dari Korea Utara yang terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2003 dari Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) yang mana Korea Utara tergabung pada 12 Desember tahun 1985 (Purwono & Zuhri, 2010). Perkembangan yang terjadi setelah didirikan *Six Party Talks*, Semenanjung Korea terlihat lebih stabil karena aksi-aksi provokatif yang dilakukan seperti penurunan aktivitas nuklir oleh Korea Utara pada tahun-tahun sebelumnya dapat diminimalisir dengan kehadiran *Six Party Talks* sehingga tahun 2009, Korea Utara memutuskan mengundurkan diri dari forum tersebut.

Deklarasi Panmunjom

Nyatanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua Korea belum berhasil menciptakan perdamaian maupaun menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan Semenanjung Korea. Hingga akhirnya kedua Korea sepaka untuk kembali melakukan upaya reunifikasi dengan menyepakati Deklarasi Panmunjom pada 27 April tahun 2018. Poin utama deklarasi ini adalah berisikan mengenai komitmen serta janji kedua negara untuk mengakhiri perang secara resmi. Selain itu, kedua Korea juga sepakat untuk melakukan kerjasama sebagai upaya dalam mewujudkan denuklirisasi di kawasan, menyambung kembali hubungan dan meminimalisir ketagangan militer di Semenanjung Korea. Deklarasi Panmunjom diimplementasikan sesuai dengan isi-isi yang tertuang didalamnya.

Terdapat poin-poin yang terlaksana dari isi Deklarasi Panmunjom ini, pada bulan Agustus 2018 diadakan pertemuan antara 180 keluarga yang terpilih. Dari 180 keluarga tersebut 93 keluarga berasal dari Korea Selatan dan 88 keluarga sisanya berasal dari Korea Utara. Selain itu, pada bulan September 2018 secara resmi kantor penghubung antar Korea Utara dan Korea Selatan dibuka di Kota Kaesong Utara. Kedua Korea juga sepakat untuk menunjukkan bakat serta persatuan bangsa dengan berpartisipasi dalam suatu laga dibawah bendera Semenanjung Korea seperti yang terjadi pada Asean Games 2018 dan Asean Para Games 2018. Di bawah bendera Semenanjung Korea kedua negara berbaris dan bersatu membentuk tim gabungan dan melayangkan pernyataan secara bersama bahwa, persatuan ini sebagai tanda baru mencairnya persaingan lama (Shin,

2018). Kesepakatan-kesepakatan negara yang muncul ini merupakan bagian dari upaya kedua Korea untuk mengupayakan rekonsiliasi, termasuk pembukaan hotline militer serta mengatur pernyataan antar masyarakat yang pecah akibat perang yang terjadi 71 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, Korea Utara mulai melanggar janji-janji yang tertera didalam Deklarasi Panmunjom seperti kembali menembakan rudal balistik milik negaranya.

1. Ketidak Efektifan Deklarasi Panmunjom

Berawal dari Korea Utara yang secara sepihak memutus hubungan dengan Korea Selatan karena Korea Utara menganggap bahwa pihak berwenang Korea Selatan tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab terkait serangan pembelot anti Korea Utara yang bermunculan. Sehingga kemudian Korea Utara kembali mengadakan uji coba nuklir yang mana kesepakatan utama dalam Deklarasi Panmunjom adalah komitmen mengani pelucutan senjata. Korea Utara juga menyatakan bahwa negaranya tidak lagi terikat dengan komitmen pelucutan senjata tersebut secara sepihak. Setelah Deklarasi Panmunjom dideklarasikan dan kemudian diimplementasikan selama beberapa waktu, kemudian deklarasi ini tenggelam seperti tidak terlihat lagi. Ketegangan antar Korea kemudian semakin terlihat saat Korea Utara akhirnya melakukan peledakan kantor penghubung Korea yang baru saja dibangun setelah Deklarasi Panmunjom disepakati.

Persepsi Korea Utara Terhadap Korea Selatan

Suatu ancaman dapat dianggap mengancam maupun tidak berdasarkan bagaimana suatu negara memandang atau mempersepsikan hal tersebut. Persepsi yang muncul di pikiran seseorang tidak selalu benar dengan kenyataannya yang terjadi. Persepsi memiliki sifat yang dinamis, yaitu tergantung pada bagaimana seseorang memandang suatu hal, dan bagaimana seseorang tadi menanggapi situasi yang terjadi. Persepsi merupakan cara pandang aktor melalui pemahaman (*beliefs*) atas aktor-aktor lainnya (*images*), serta apa yang nantinya akan dilakukan oleh aktor tersebut terhadap situasi yang terjadi (*intentions*) yang nantinya akan menentukan tindakan suatu negara (Jervis, 2017). Untuk memahami kebijakan serta perilaku Korea Utara mengenai persepsinya tentang isu-isu yang melibatkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut serta bagaimana Korea Utara sebenarnya memandang Korea Selatan, maka perlu dipahami bagaimana perkembangan pola pikir Korea Utara dari waktu ke waktu. Singkatnya, saat Korea menjadi korban geopolitik yang dihimpit oleh dua negara *superpower* yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat Korea terbagi menjadi dua dengan ideologinya masing-masing yang berbeda (Park, 2000). Perbedaan ideologi ini menjadi hal yang paling menonjol, dimana kemudian Korea Utara dengan ideologi komunis-sosialisnya dan Korea Selatan yang menganut liberal-demokratis.

Dalam teori persepsi terdapat tiga poin utama yang sudah dijelaskan sebelumnya. *Images* adalah suatu hal yang terlihat atau tergambar perilaku yang suatu negara. Dalam kasus ini, Korea Utara mengamati perilaku Korea Selatan yang memiliki hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Sehingga atas pandangan tersebut Korea Utara mengembangkan pemahaman yang disebut dengan *belief* yaitu dengan mempercayai dan melihat keberadaan Korea Selatan sebagai ancaman bagi kemandirian negaranya. Sejak terpecah, Korea Utara memang memilih menjadi negara yang sangat tertutup sehingga sulit untuk menjalin hubungan atau komunikasi antar Korea Utara dengan negara lainnya (Muhamad, 2016). Sehingga tindakan (*intentions*) yang dilakukan oleh Korea Utara adalah selalu menuduh dan memiliki prasangka buruk kepada Korea Selatan. Terkait persepsi Korea Utara yang menganggap Korea Selatan sebagai ancaman

bagi negaranya dikarenakan keberadaan Amerika Serikat. Korea Utara maupun Korea Selatan tentunya saling meningkatkan kemampuan militernya untuk mengimbangi kekuatan militer satu sama lain. Terkait perkembangan dalam kemampuan militer masing-masing negara, kemampuan militer yang dimiliki oleh Korea Utara memang besar dan Korea Utara juga selalu memiliki alasan untuk terus mengembangkan kemampuan militernya. Dalam hal ini, Korea Utara terus-menerus mengembangkan kemampuan militernya dikarenakan Korea Utara beranggapan bahwa Korea Selatan juga memiliki persenjataan atau kemampuan militer yang cukup kemudian diperlengkap dengan keberadaan Amerika Serikat.

Sejak dahulu Korea Utara memang selalu merasa terancam dengan keberadaan Korea Selatan seperti pada saat pengumuman PBB yang mengumumkan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang diakui pada tahun 1948, yang mana di tahun-tahun sebelumnya setelah Semanjung Korea terpecah Korea Utara maupun Korea Selatan terus berusaha bersaing agar menjadi satu-satunya pemerintahan yang diakui. Korea Utara juga menjadi negara yang lebih tertutup karena pada saat itu Korea Utara juga beranggapan bahwa PBB cenderung lebih berpihak pada Korea Selatan.

“...Mereka harus menghentikan semua latihan perang nuklir yang mereka lakukan dengan kekuatan luar, karena latihan ini akan membakar tanah ini dan menyebabkan pertumpahan darah di wilayah suci kita. Mereka juga harus menahan diri dari segala tindakan membawa persenjataan nuklir dan pasukan agresif dari Amerika Serikat”(NCNK, 2018).

Melalui kutipan diatas, Kim Jong-un terlihat menginginkan agar Korea Selatan segera menyudahi hubungan kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan Korea Utara yang merasa terancam dengan keberadaan Korea Selatan karena hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat. Korea Utara juga mengajak Korea Selatan agar dapat berkejasama untuk meredakan ketegangan yang tengah terjadi serta menciptakan kawasan yang damai secara bersama-sama.

“...Utara dan Selatan harus berhenti melakukan tindakan yang dapat membat situasi semakin buruk, dan mereka harus mengupayakan peredaan ketegangan militer dan menciptakan lingkungan yang damai...” (NCNK, 2018).

Sebelumnya, sejak dahulu Korea Utara memang selalu merasa terancam dengan keberadaan Korea Selatan seperti pada saat pengumuman PBB yang mengumumkan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang diakui pada tahun 1948, yang mana di tahun-tahun sebelumnya setelah Semanjung Korea terpecah Korea Utara maupun Korea Selatan terus berusaha bersaing agar menjadi satu-satunya pemerintahan yang diakui. Korea Utara juga menjadi negara yang lebih tertutup karena pada saat itu Korea Utara juga beranggapan bahwa PBB cenderung lebih berpihak pada Korea Selatan.

Persepsi Korea Utara Terhadap Deklarasi Panmunjom

Deklarasi Panmunjom memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik kawasan Semanjung Korea yang terus berlanjut karena diharapkan akan memberikan kesempatan demi tercapainya resolusi konflik. Dalam artikel 9 bab 1 konstitusi Korea

Utara mengutarakan bahwa,

“...DPRK akan berusaha untuk mencapai kemenangan penuh sosialisme di bagian utara Korea dengan memperkuat kekuatan rakyat dan dengan penuh semangat melakukan tiga revolusi - ideologis, budaya dan teknis - dan menyatukan kembali negara berdasarkan prinsip kemerdekaan, penyatuan kembali secara damai dan persatuan nasional yang besar...”(Project, 2018).

Melalui kutipan pasal tersebut, Korea Utara menganggap upaya penyatuan kembali merupakan salah satu kepentingan nasional negaranya yang perlu direalisasikan segera. Bahkan Korea Utara sendiri menekankan bahwa melakukan reunifikasi Semenanjung Korea merupakan prinsip kemerdekaan, reunifikasi yang damai serta persatuan bangsa yang besar. Alasan lainnya mengapa Korea Utara memiliki keinginan untuk melakukan reunifikasi adalah dikarenakan peristiwa warga negara Korea Utara yang melarikan diri dari Korea Utara untuk pergi ke Korea Selatan dan negara lainnya karena adanya bencana kelaparan di Korea Utara.

Pada saat menyepakati Deklarasi Panmunjom dalam pertemuannya dengan Presiden Moon Jae-in, Presiden Kim Jong-un menyepakati bahwa deklarasi ini berisikan perjanjian meminimalisir senjata militer secara bertahap, memberhentikan pertengkatan, mengubah betasan di zona damai hingga penggelaran dialog multilateral.

“...Kami akan menciptakan hasil yang baik dengan berkomunikasi erat, demi membuktikan bahwa perjanjian yang kami ditandatangani hari ini di hadapan dunia internasional, tidak akan berakhir seperti perjanjian sebelumnya...” (dw, 2018)

Kim Jong-un sebagai pemimpin yang memiliki tujuan menciptakan sejarah baru bagi negaranya yaitu untuk segera mencapai reunifikasi. Dengan dilaksanakannya reunifikasi yang terlihat cukup menjanjikan ini, Kim Jong-un berharap akan mengurangi angka pelarian warga Korea Utara yang mana kondisi ini nantinya akan meninggalkan kesan baik bagi masa kepemimpinan Kim Jong-un. Mengingat hubungan negaranya dengan Amerika Serikat tidak baik, kesempatan ini juga kemudian digunakan oleh Kim Jong-un untuk berdialog dengan Amerika Serikat terkait program nuklir yang selama ini menjadi permasalahan keamanan dunia. Melalui pertemuan ini kemudian Korea Utara menyatakan janji yang cukup mencengangkan yaitu bahwa negaranya akan menghancurkan situs nuklir.

Mispersepsi Korea Utara terhadap Korea Selatan dalam Pelaksanaan Deklarasi Panmunjom

Mispersepsi dapat memiliki pengaruh terhadap politik luar negeri suatu negara. Robert Jervis menyatakan mispersepsi sering terjadi dalam politik luar negeri. Dimana para pengambil keputusan kurang memperhatikan serta salah memperhitungkan kemungkinan bahwa pesan atau pidatinya tersebut dapat dipahami dengan benar atau tidak oleh pihak lain. Mispersepsi juga dapat terjadi ketika para pembuat keputusan sadar bahwa perilakunya bisa saja tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Menurut Robert Jervis mispersepsi merupakan penarikan kesimpulan yang

tidak akurat, kesalahan dalam memperhitungkan akibat, serta kesalahan dalam menilai bagaimana pihak lain akan bertindak (Jervis, 2015). Kemunculan mispersepsi dapat dikarenakan adanya tindakan dari suatu negara yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang di ekspektasikan.

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya mispersepsi, salah satunya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah adanya konsistensi kognitif dimana individu cenderung meyakinkan apa yang sudah diyakinkannya sejak lama. Dalam kasus ini, penyebab terjadinya mispersepsi dikarenakan faktor yang pertama yaitu adanya konsistensi kognitif. Keadaan dimana Korea Utara tetap merawat persepsi buruknya yang sudah ditanamkan sejak dahulu kepada Korea Selatan atau yang disebut dengan *pre-existing beliefs*.

Deklarasi Panmunjom tidak hanya berisikan kesepakatan antar-Korea mengenai upaya menghentikan konflik yang terjadi, Deklarasi Panmunjom juga berperan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea. Namun, keadaan semakin memburuk dan tegang ketika akhirnya Korea Utara memutuskan untuk meledakan kantor penghubung yang didirikan pada tahun 2018 sebagai fasilitas yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi Korea Utara dan Korea Selatan dalam penerapan deklarasi. Setelah peledakan dilakukan, tentunya kata perdamaian yang terdapat di dalam Deklarasi Panmunjom kembali belum bisa tercapai. Sebelumnya, pada Januari tahun 2020 kantor ini ditutup dikarenakan kekhawatiran atas penyebaran virus corona. Namun kemudian terjadi peledakan kantor penghubung yang dilakukan oleh Korea Utara pada 16 Juni tahun 2020 ini disebabkan oleh penyebaran selebaran propaganda yang dilakukan oleh kelompok pembelot Korea Utara mengenai hal-hal yang berisikan kritik terhadap isu HAM di Korea Utara. Hal ini tentunya menimbulkan rasa marah bagi Korea Utara karena Korea Utara beranggapan bahwa Korea Selatan tidak mengambil tindakan apapun terkait pencegahan dari tindakan propaganda ini.

Beberapa hari sebelum peledakan dilakukan, Pyongyang telah melontarkan beberapa ancaman terhadap Korea Selatan dan mengancam akan menghancurkan kantor tersebut jika kelompok pembelot Korea Selatan terus melanjutkan kampanye mereka untuk mengirim selebaran propaganda dan materi lainnya yang melintasi perbatasan. Selain itu, melalui pernyataan Korea Utara diatas melalui Kim Yoo-Jong juga menyatakan bahwa dirinya merasa upaya rekonsiliasi yang tengah dilakukan hanyalah sampai tahapan perundingan dan tidak mencapai apa yang sebenarnya diinginkan.

“...Korea Selatan berperilaku seperti anjing kampung yang cenderung melakukan konfrontasi dalam laporan media pemerintah yang menjelaskan keputusan rezim untuk meledakan kantor penghubung bersama...” -*Kim Yoo-Jong* (Justin, 2020)

Bahkan setelah kantor penghubung antar-Korea diledakan, Korea Utara menuduh Korea Selatan dengan sistemis melanggar dan menghancurkan kesepakatan yang dicapai pada tahun 2018 lalu, termasuk Deklarasi Panmunjom. Korea Utara menyamakan Menteri Pertahanan Korea Selatan dengan “anjing kampung galak” yang “menyombong dan menggeretak, menakuti rekan dialognya dan memicu atmosfer yang konfrontasional” (Vincent, 2020). Kegiatan propaganda yang dipermasalahkan bukanlah hal baru bagi Korea Utara maupun Korea Selatan. Kelompok aktivis yang berasal dari Korea Selatan kerap mengirimkan balon yang melintasi perbatasan disertakan dengan selebaran yang

mengancam mengenai isu HAM yang dilakukan oleh pihak Korea Utara.

Mispersepsi yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan kemudian mempengaruhi Korea Utara dalam pengambilan keputusan yang hanya menyebabkan ketegangan antar-Korea kembali tercipta. Dimana pada akhirnya Korea Utara secara sepihak melakukan pemutusan hubungan dan tidak mau melanjutkan Deklarasi Panmunjom lagi dengan meledakan kantor pehubung Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam hal ini, mispersepsi yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan disebabkan oleh faktor konsistensi kognitif yaitu karena adanya *pre-existing beliefs* yang sudah tertanam sejak lama dari Korea Utara terhadap Korea Selatan. Yaitu, dimana Korea Utara yang terus merawat persepsi buruknya terhadap Korea Selatan sebagai musuh dan saingan bagi negaranya.

“...Korea Utara akan memblokir semua jalur komunikasi dengan Korea Selatan, termasuk hotline militer, karena berjanji untuk membalikan *détente* baru-baru ini di Semenanjung Korea dan mulai memperlakukan Korea Selatan sebagai “musuh”...” (Sanghun, 2020)

Pada kenyataannya, Korea Selatan bukanya tidak melakukan tindakan apapun terkait serangan dari para pembelot Korea Utara. Korea Selatan menyatakan bahwa negaranya telah berupaya untuk menindak para pembelot hingga dibawa ke ranah hukum. Bahkan, pada saat menerima laporan aksi pembelot pihak kepolisian dari Korea Selatan segera bergegas menuju lokasi demi mencegah serta menghentikan aktivitas dengan menyita barang-barang bukti (KBSWorld, 2022). Selama masa pemerintahannya, Presiden Moon Jae-in juga berusaha untuk terus mencegah kampanye anti-Korea Utara di perbatasan sebagai upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

Sebelumnya berbagai organisasi Hak Asasi Manusia selama bertahun-tahun selalu mengirim barang semacam selebaran, USB, uang atau bahkan ayat-ayat Alkitab ke Korea Utara. Namun, kemudian Korea Selatan membentuk undang-undang yang melarang kegiatan tersebut dilakukan. Undang-undang ini ditujukan terutama kepada para aktivis, termasuk semua organisasi yang dipimpin oleh pembelot Korea Utara dan misionaris Kristen,

“...sebagian besar barang dikirim dengan balon besar yang terbang melewati zona demiliterisasi. Namun, setelah partai berkuasa Korea Selatan berhasil mendesakkan legislasi baru di parlemen negara itu pada 14 Desember tahun 2020, pengiriman materi tanpa izin sudah dinyatakan illegal...” (Strother, 2020).

Setelah undang-undang ini diberlakukan, mereka yang nantinya dinyatakan bersalah melanggar undang-undang anti-selebaran yang sudah dibuat tersebut akan dihadapkan dengan ancaman denda senilai 27 ribu dollar, serta hukuman penjara selama tiga tahun.

Setelah kerenggangan kembali terjadi, bahkan Korea Selatan masih terus berupaya untuk mengajak Korea Utara melanjutkan proses reunifikasi dan kerjasama lainnya. Presiden Moon Jae-in pada akhir masa kepresidenannya menyampaikan bahwa Deklarasi Panmunjom ini merupakan tonggak perdamaian yang tidak dapat dirusak oleh siapapun,

dan jalan perdamaian yang sudah dijanjikan dalam deklarasi ini tidak dapat dibatalkan dalam keadaan apapun. Presiden Mon berharap agar dialog diantara kedua Korea dapat dilanjutkan kembali sehingga proses reunifikasi dapat segera tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidak-efektifan Deklarasi Panmunjom dalam upayanya untuk perdamaian serta denuklirisasi Semenanjung Korea terjadi karena adanya persepsi buruk dari Korea Utara terhadap Korea Selatan yang kemudian menimbulkan mispersepsi. Sejak Semenanjung Korea terpecah, Korea Utara mempercayai dan melihat keberadaan Korea Selatan sebagai ancaman bagi keamanan negaranya. Salah satu penyebab munculnya persepsi buruk ini adalah saat PBB mengesahkan Korea Selatan sebagai satu-satunya negara yang sah dan hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Kemunculan persepsi dari Korea Utara menjadikan bias atau penilaian atau pandangan dari suatu negara ke negara lainnya. Kaitannya dengan konsistensi kognitif, dimana Korea Utara meyakini apa yang sudah diyakini oleh negaranya sejak lama terhadap Korea Selatan walaupun kenyataan yang terjadi sudah jelas bertentangan dengan keyakinannya tersebut dan tetap memutuskan untuk tetap berpegang pada keyakinannya yang salah.

Melalui penelitian ini kemudian dapat dipelajari bahwa dalam proses kognitif dapat mempengaruhi penilaian serta kesimpulan yang tidak masuk akal. Biasanya menyebabkan distorsi perseptual, penilaian yang tidak akurat, interpretasi yang tidak masuk akal, atau yang secara umum disebut dengan irasionalitas. Dalam fenomena ini serangan kelompok pembelot mengenai penyebaran propaganda ke perbatasan ini memperburuk keadaan Korea Utara dan Korea Selatan yang sedang mengupayakan reunifikasi. Keadaan kemudian semakin tegang dengan keputusan yang tidak diprediksi dan tidak masuk akal diambil oleh Korea Utara untuk meledakan kantor penghubung yang memfasilitasi komunikasi kedua korea pada tahun 2018 lalu dan memutuskan hubungannya dengan Korea Selatan secara sepihak.

Tindakan Korea Utara ini tentunya melanggar nilai kesepakatan yang tertera dalam Deklarasi Panmunjom yaitu dalam meminimalisir ketegangan militer dan menghapuskan hal-hal yang berbau propaganda. Perilaku ini dilakukan Korea Utara dalam bentuk kekecewaan negaranya yang menganggap Korea Selatan tidak mencegah kegiatan para pembelot. Proses denuklirisasi yang dilakukan oleh kedua negara seharusnya dapat membuat negara menjadi lebih rasional, Namun, hal-hal yang dilakukan oleh Korea Utara ini malah berlawanan dan tidak rasional. Maka dapat dipelajari, perilaku dari Korea Utara yang tidak mudah ditebak ini akan menjadi tantangan yang harus dihadapi kedepannya dalam keperluan pencapaian kerjasama mengenai kawasan yang bebas nuklir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing 2 dan Dewi Setyaningsih, S.I.P., M.A. selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- DW. (2018). *Korea Utara dan Korea Selatan Sepakat Akhiri Perang*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/korea-utara-dan-korea-selatan-sepakat-akhiri-perang-apa-komentar-dunia/a-43563627>
- Festinger, L. (1968). *Theory Cognitive Dissonance*. 1–291.
- Jervis, R. (2015). War and misperception. *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*, 18(4), 194–210. <https://doi.org/10.2307/204820>
- Jervis, R. (2017). *Preception and Misperception in International Politics* (new editio). Princeton University Press.
- Jung, J. K. (2012). *South Korea's Reunification Dilemmas*”, *Asian Politics & Policy* (Vol. 4). Wiley Periodicals, Inc.
- Justin, M. (2020). *North Korea accuses South of being like a “mongrel dog” as relations worsen*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2020/jun/17/north-korea-raises-tension-with-pledge-to-send-troops-to-border-with-south>
- KBS. (2000). *2000 Inter-Korean Summit*.
- KBSWorld. (2022). *Kelompok Pembelot Korut di Korsel Kembali Terbangkan Balon Berisi Selebaran Anti-Pyongyang*. KBS World. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=68323
- Muhamad, S. V. (2016). *UPAYA DAMAI PARLEMEN Security Issue in The Korean Peninsula and Parliament 's Peace Initiatives*. 121–143.
- NCNK. (2018). *Kim Jong Un's 2018 New Year's Address*. The National Committee On North Korea. <https://www.ncnk.org/node/1427>
- Park, H. S. (2000). North Korean perceptions of self and others: Implications for policy choices. *Pacific Affairs*, 73(4), 503–516. <https://doi.org/10.2307/2672441>
- Project, C. C. (2018). *Korea (Democratic People 's Republic of)' s Constitution of 1972 with Amendments through 1998*.
- Purwono, A., & Zuhri, A. S. (2010). Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional. *Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 7(2), 1–21.
- Rosyidin, M. (2018). *20 Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh*. DEEPUBLISH.
- Rosyidin, M. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Edisi 2*. Suluh Media.
- Sang-hun, C. (2020). *North Korea Cuts Off All Communications Lines to South Korea*. The New York Times.
- Shin, H. (2018). *North, South Korea agree to joint teams for Asian Games*. June 18. <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-idUSKBN1JE118>
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366. <https://doi.org/10.1177/0956797611417632>
- Strother, J. (2020). *Seoul Bans Anti-North Korea Leaflets Drops*. VOA. https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_seoul-bans-anti-north-korea-leaflet-drops/6199586.html
- Sung-mi, A. (2021). *Declaration, two Koreas remain deadlocked*. April 26.

- UNODA. (n.d.). *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*. United Nations. Retrieved November 20, 2022, from <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>
- Vincent, M. (2020). *North Korea accuses South Korea of behaving like a “mongrel dog” and Kim Jong Un’s sister brands the South’s president a “US flunky” as tensions rise between the two countries after the blowing up of a joint liaison office*. Mail Online. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8431009/North-Korea-accuses-South-Korea-behaving-like-mongrel-dog-blowing-liaison-office.html>